

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.1.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Sukirno (1994) dalam (Liow et al., 2022) mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diukur berdasarkan harga konstan, yang mencerminkan pertambahan produksi barang dan jasa dari satu tahun ke tahun berikutnya (Mukti & Soraya, 2024).

Menurut Fitriyani & Fisabilillah (2022) dalam perhitungannya, PDRB memiliki tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. PDRB dapat menjadi pertimbangan bagi investor yang akan menanamkan modal di suatu daerah. Adapun pendekatan PDRB sebagai berikut:

1. Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi ini dikelompokkan ke dalam 17 kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Adapun rumus yang digunakan dalam pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$Y = (P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + \dots (P_n \times Q_n)$$

Di mana:

Y : nilai total pendapatan daerah

P : harga barang dan jasa dari setiap sektor ekonomi

Q : jumlah barang dan jasa dari semua sektor ekonomi

2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok dan (5) ekspor neto (ekspor neto merupakan

ekspor dikurangi impor). Rumus dari pendekatan pengeluaran yaitu sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = C + I + G + (X - M)$$

Di mana:

C	: Konsumsi
I	: Investasi
G	: Pengeluaran Pemerintah
X	: Ekspor
M	: Impor

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan di mana semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Pendekatan ini memberikan gambaran bagaimana pendapatan dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi dan kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap perekonomian. Untuk rumus dari pendekatan pendapatan yaitu sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = r + w + i + p$$

Di mana:

r	: Sewa
w	: Upah atau gaji tenaga kerja
i	: Bunga
p	: Keuntungan Perusahaan

2.1.1.2 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang menunjukkan bagaimana suatu ekonomi berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Menurut Sukirno (2011) dalam (Simangunsong et al., 2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mencakup perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi kemudian kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Todaro (2000) menjelaskan terdapat tiga faktor atau komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertama, akumulasi modal yang berupa segala bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang kemudian menambah jumlah tenaga kerja serta yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Ukuran produksi ini dinyatakan dalam konsep nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut, yang secara keseluruhan dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) (Ganar et al., 2021).

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. *Production* Teori Cobb-Dauglas

Pada fungsi Cobb-Dauglass, output merupakan fungsi dari tenaga kerja dan akumulasi modal. Dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_t = A_t K_t^a L_t^{1-a}$$

Di mana:

Y_t : tingkat produksi/output pada tahun t

A_t : tingkat teknologi pada tahun t

K_t : jumlah stok modal pada tahun t

L_t : jumlah tenaga kerja pada tahun t

Dalam kerangka fungsi Cobb-Dauglass, hubungan antara penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, di mana dalam model ini, indeks pembagunan TIK berperan dalam memperkuat aspek teknologi (A_t), semakin luas teknologi maka semakin tinggi kemampuan pelaku ekonomi dalam memperoleh informasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Pembangunan TIK yang baik juga membantu tenaga kerja bekerja secara lebih produktif dan adaptif.

Selain itu, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri memberikan pengaruh pada peningkatan modal (K_t) melalui aliran investasi yang masuk pada sektor-sektor domestik. Dari dana asing yang masuk dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi, perluasan kapasitas industri, serta penerapan teknologi baru.

Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang di mana ketika partisipasi angkatan kerja meningkat akumulasi sumber daya manusia dan adopsi teknologi meningkat seiring dengan peningkatan pada *human capital*.

Secara keseluruhan, melalui pendekatan Cobb-Dauglass, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi saling berinteraksi dalam memengaruhi output ekonomi dengan cara meningkatkan modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dengan hubungan yang saling melengkapi tersebut, maka keempat variabel ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan output yang berkelanjutan (Mandal & Taku, 2024).

2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan pada tahun 1956, merupakan salah satu model neoklasik yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Model ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, serta bagaimana perekonomian mencapai kondisi konstan atau *steady state* (Rosul, 2024). Teori ini menjadi salah satu landasan utama dalam studi ekonomi pembangunan dan makroekonomi modern.

Pada umumnya, teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik didasarkan pada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglass tahun 1928, yang dikenal sebagai fungsi produksi Cobb-Douglass (Agusalim, 2022). Dengan demikian, fungsi produksi dalam model pertumbuhan neoklasik digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi

serta kondisi keseimbangan suatu perekonomian. Fungsi produksi dalam model pertumbuhan neoklasik mengambil bentuk berikut:

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

Di mana:

- Y : Output
- A : Koefisien Teknologi
- K : *capital*
- L : *labour*

Fungsi produksi Cobb-Douglass adalah suatu fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana salah satu variabel berperan sebagai variabel terikat (*dependent variable*) yang dijelaskan, sementara variabel lainnya merupakan variabel bebas (*independent variable*) yang berfungsi sebagai faktor yang menjelaskan.

Untuk memudahkan dalam estimasi atau pendugaan terhadap persamaan di atas dapat dilakukan dengan mengubah bentuk linear berganda dengan cara menjadikannya dalam bentuk logaritma, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 \ln X_4 + e$$

a. Elastisitas

Elastisitas dalam fungsi produksi Cobb Dauglass mengacu pada seberapa besar perubahan output sebagai respon terhadap perubahan input tertentu. Karena model yang digunakan berbentuk log-log, maka koefisien regresi dari masing-masing variabel independen dapat langsung diinterpretasikan sebagai elastisitas. Secara umum, nilai elastisitas dikategorikan sebagai berikut:

1. Elastisitas (> 1): perubahan input sebesar 1persen akan menghasilkan perubahan output lebih dari 1persen. Input ini dikatakan sangat responsif terhadap output.
2. Inelastisitas (< 1): perubahan input sebesar 1persen akan menghasilkan perubahan output kurang dari 1persen. Artinya, input ini kurang responsif terhadap output.
3. Uniter ($=1$): perubahan input sebesar 1persen akan menghasilkan perubahan output sebesar 1persen.

Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh berbagai faktor, di mana masing-masing elemen memainkan peran penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi:

1. Sumber Daya

Sumber daya berperan sebagai elemen fundamental dalam dinamika pertumbuhan ekonomi, karena membentuk fondasi utama bagi aktivitas produksi. Dalam kerangka ekonomi, sumber daya meliputi sumber daya alam serta sumber daya manusia. Sumber daya alam, seperti tanah, udara, mineral, dan energi, menyediakan input penting untuk berbagai sektor produksi, khususnya industri primer dan manufaktur yang bergantung pada bahan baku.

Ketersediaan serta pengelolaan sumber daya alam yang efisien mampu meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah ekonomi di suatu wilayah.

Di sisi lain, sumber daya manusia memegang peranan penting seperti jumlah penduduk usia kerja, tingkat pendidikan, keterampilan, dan tenaga kerja kesehatan menentukan produktivitas ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dalam aktivitas ekonomi. Semakin signifikan proporsi tenaga kerja yang produktif dan berkualitas, semakin besar pula potensi untuk meningkatkan output dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, alokasi investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta stimulasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Susila, 2022).

2. Teknologi

Teknologi dan inovasi merupakan komponen penting yang berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi mendorong terciptanya efisiensi dalam proses produksi, sementara inovasi menjadi fondasi utama dari perkembangan teknologi tersebut. Perubahan teknologi dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi karena berkaitan erat dengan transformasi metode produksi yang dihasilkan melalui pembaruan dan pengembangan teknik penelitian yang lebih maju.

Perkembangan teknologi tersebut telah memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, modal, serta faktor-faktor produksi lainnya, sehingga memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang

lebih besar dengan penggunaan input yang relatif sama. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern. Lebih lanjut, Kuznets memandang inovasi sebagai unsur teknologi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, inovasi yang fokus pada penurunan biaya produksi tanpa disertai perubahan pada kualitas maupun karakteristik produk. Kedua, inovasi yang menghasilkan pembaruan produk atau proses yang mampu menciptakan permintaan baru terhadap suatu barang atau jasa. Kedua jenis inovasi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperluas aktivitas produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

3. Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah proses di mana investasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Modal mencakup semua alat dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin, gedung, dan teknologi. Semakin banyak modal yang diinvestasikan, semakin besar potensi output yang dapat dihasilkan. Namun, akumulasi modal harus dilakukan secara efisien; jika investasi tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan optimal.

Kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif juga berperan penting dalam mendorong akumulasi modal.

2.1.2 Investasi

2.1.2.1 Teori Investasi

a. Teori Harrod Domar

Teori Harrod Domar yang diperkenalkan pertama kali oleh dua ahli ekonomi, yaitu Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar pada akhir 1930-an dan awal 1940-an. Harrod Domar menekankan bahwa investasi dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Teori menitikberatkan pada peran investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat Tabungan dan efisiensi investasi, yang diukur dengan rasio total output (Pratiwi & Saputro, 2024).

Harrod Domar menyebutkan bahwasannya berkedudukan strategis dalam membangun perekonomian sebuah negara. Selain itu dijelaskan bahwasannya jika negara ingin adanya sebuah pertumbuhan ekonomi dengan kapasitas penuh, maka permintaan yang ditimbulkan karena adanya penambahan investasi harus diiringi dengan penawaran. Adanya investasi akan mendorong kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi serta output yang dihasilkan sehingga dapat mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Penanaman Modal Asing

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing

untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia. Penanam modal asing yakni perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing yang melakukan usaha penanaman modal di negara republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang no 1 tahun 1967 dan Undang-Undang no 11 tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah penanaman modal secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan ketentuan Undang - Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, sedangkan pengertian modal asing dari tinjauan dan pembahasan Undang-Undang no 1 tahun 1967 dan Undang Undang no 11 tahun 1970 antara lain sebagai berikut:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperbolehkan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Menurut Kairupan (2013) dalam (Yuspin & Muhammad, 2022) penanaman modal asing merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang strategis untuk mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengembangan sektor riil,

yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap perluasan peluang kerja secara signifikan. Pentingnya peran penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga tercermin dalam tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.

2.1.3.1 Jenis-Jenis Penanaman Modal Asing

Menurut Fadhilah et al. (2023) penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam beberapa jenis investasi, yaitu:

1. Investasi Langsung

Investasi langsung atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia. Pengertian penanaman modal langsung ini sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management*), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.

2. Investasi Tidak langsung

Investasi tidak langsung, yang juga dikenal sebagai investasi portofolio, umumnya bersifat jangka pendek. Bentuk penanaman modal ini meliputi

transaksi di pasar modal dan pasar uang, sehingga dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh sifat kegiatan jual-beli saham atau mata uang yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat, yang sangat bergantung pada nilai bisnis saham dan/atau mata uang yang diperdagangkan. Penanaman modal secara langsung dinilai memiliki keuntungan yang lebih besar untuk negara pengimpor modal, dikarenakan:

- a) Investasi langsung memperkenalkan ilmu, teknologi, dan organisasi baru yang mutakhir kedalam negara pengimpor modal,
- b) Investasi langsung Sebagian labanya ditanamkan Kembali di negara pengimpor modal dalam bentuk pengembangan atau modernisasi,
- c) Kemungkinan pelarian modal dapat diminimalisir,
- d) Pada tahap awal pembangunan, investasi asing langsung juga meringankan beban neraca pembayaran negara berkembang karena tenggang waktu pengoperasian dan perolehan laba akan sedikit lebih lama.

2.1.3.2 Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal domestik. Penanam modal tersebut dapat berupa individu warga negara Indonesia atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Mufthi et al., 2023). Tingkat investasi yang lebih tinggi secara teoritis mencerminkan dampak positif terhadap pertumbuhan

ekonomi yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai modal pengembangan, yang selanjutnya direalisasikan dalam berbagai proyek pembangunan guna mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi di suatu wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Pasal 1, perusahaan yang diperkenankan menggunakan modal dalam negeri diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan asing. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, terlebih dahulu dijabarkan pengertian modal dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, yang menjadi dasar pengaturan dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Pasal 1, perusahaan yang diperkenankan menggunakan modal dalam negeri diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan asing. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, terlebih dahulu dijabarkan pengertian modal dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, yang menjadi dasar pengaturan dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam negeri.

1. Undang-Undang yang dimaksud dengan “modal dalam negeri” adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun pihak swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang dialokasikan atau disediakan untuk menjalankan kegiatan usaha, sepanjang modal tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Pihak swasta pemilik modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat berupa perseorangan maupun badan hukum yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam undang-undang ini adalah pemanfaatan kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai penanam modal dalam negeri meliputi warga negara Indonesia secara perseorangan, badan usaha Indonesia, serta badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Lebih lanjut, pihak yang berhak mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri mencakup berbagai bentuk badan usaha, antara lain Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma (Fa),

badan usaha koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta individu perseorangan.

2.1.3.3 Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan regional. Keberadaan PMDN tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat struktur ekonomi domestik (Asiyan, 2013). Adapun beberapa manfaat utama dari PMDN dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penanaman modal dalam negeri dapat menghemat cadangan devisa, PMDN berkontribusi dalam penghematan devisa melalui pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan dan produk dari luar negeri. Dengan meningkatnya kapasitas produksi domestik akibat investasi dalam negeri, kebutuhan impor barang modal maupun barang konsumsi dapat ditekan. Hal ini berdampak pada berkurangnya pengeluaran devisa serta memperbaiki neraca pembayaran, khususnya pada komponen transaksi berjalan.
2. Penanaman modal dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, melalui PMDN, industri dalam negeri memperoleh dukungan modal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Kondisi ini memungkinkan produk domestik mampu bersaing dengan produk impor, baik dari segi harga maupun mutu. Dengan demikian, PMDN berperan dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap barang dan jasa yang berasal dari luar negeri.

3. Penanaman modal dalam negeri mendorong kemajuan industri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang. Keterkaitan ke depan berarti bahwa industri yang berkembang akan menciptakan permintaan untuk produk dan layanan lainnya, sedangkan keterkaitan ke belakang menunjukkan bahwa investasi dalam satu sektor dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor lain yang menyediakan bahan baku dan layanan pendukung. Hal ini menciptakan ekosistem industri yang saling mendukung dan berkelanjutan.
4. Penanaman modal dalam negeri mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dengan bertambahnya investasi yang signifikan dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung melalui pembukaan usaha dan proyek investasi, maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan sektor-sektor pendukung. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu menghemat devisa, memperkuat kemandirian industri nasional, menciptakan keterkaitan antarsektor ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, PMDN memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang sudah memasuki usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja yaitu 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun tidak bekerja atau menganggur. Angkatan kerja merupakan yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dari penduduk yang termasuk dalam pasar kerja yaitu yang bekerja atau yang mencari pekerjaan.

Angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo dalam (Murianti & Hadi, 2022) ialah besaran penduduk yang memiliki pekerjaan ataupun yang masih mengejar kesempatan dalam rangka mendapatkan pekerjaan yang bernilai. Ada dua kategori penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja: mereka yang bekerja dan mereka yang tidak (menganggur atau sedang mencari pekerjaan). Angkatan kerja terbagi menjadi tiga, yaitu: penduduk usia yang bekerja, penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara, dan penduduk yang menganggur atau pengangguran. Untuk mengukur persentase populasi orang dewasa yang berpartisipasi dalam angkatan kerja maka dapat diukur dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Rumus menghitung TPAK, yaitu sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \left(\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \right) \times 100 \text{persen}$$

Menurut Payaman Simanjuntak (2003: 120) dalam (Ariesti & Asmara, 2023) berpendapat bahwa jika semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka semakin tinggi pula angkatan kerja yang sama dalam satu kelompok. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin tinggi jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula jumlah yang termasuk ke dalam golongan yang bukan angkatan kerja, dan mengakibatkan kecilnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

2.1.4.1 Teori Partisipasi Pasar Tenaga Kerja

Menurut teori partisipasi pasar tenaga kerja yang dikemukakan oleh Blundell & MaCurdy (1999) Teori ini secara fundamental berpendapat bahwa individu akan memutuskan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja apabila mereka mengantisipasi banyaknya manfaat yang diperoleh dari keterlibatan tersebut. Tingkat upah yang ditawarkan di pasar kerja merupakan faktor penentu utama yang mempengaruhi keputusan ini. Jika upah yang tersedia cukup tinggi dan peluang pekerjaan yang sesuai dengan preferensi serta kualifikasi individu, maka mereka cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan kerja. Sebaliknya, jika upah rendah atau peluang kerja tidak mencukupi, individu mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja untuk waktu sementara.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ada beberapa jenis tingkat partisipasi angkatan kerja menurut Ariesti & Asmara (2023), yaitu sebagai berikut:

1. Pekerja penuh

Angkatan kerja pekerja penuh yaitu mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, di mana jam kerjanya berkisar antara 8 hingga 10 jam per harinya.

Selain itu, kelompok pekerja penuh juga bekerja secara teratur dalam waktu satu minggu, sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada perusahaan masing-masing. Pekerja penuh juga akan memperoleh penghasilan atas pekerjaannya tersebut.

2. Setengah Menganggur

Angkatan kerja setengah menganggur yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan, namun pekerjaannya tidak bisa dilihat dari tingkat produktivitasnya, waktu kerja, atau penghasilannya. Biasanya, kelompok yang satu ini merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebagaimana bekerja pada perusahaan. Kategori setengah menganggur ini bisa dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Setengah menganggur kentara, kondisi di mana seseorang yang sudah bekerja, tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu.
- b) Setengah menganggur tidak kentara, ini adalah mereka yang tidak produktif dalam bekerja dan mempunyai pendapatan yang cukup rendah. Biasanya kategori ini juga termasuk orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebagaimana pekerja dalam sebuah perusahaan.

3. Pengangguran

Angkatan kerja pengangguran adalah orang-orang yang sedang berada di dalam usia produktif namun tidak mempunyai pekerjaan atau sedang proses mencari pekerjaan. Kelompok yang satu ini bisa cepat berubah menjadi angkatan kerja, apabila mereka segera mendapatkan pekerjaan.

2.1.5 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan TIK merupakan suatu indikator untuk mengukur perkembangan TIK suatu negara atau wilayah dalam rangka menuju masyarakat informasi. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama ICT Development Index (ICT-DI). Indeks Pembangunan TIK berperan penting dalam mempercepat kemajuan industri, meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan serta operasional bisnis, dan membangun fondasi yang krusial bagi perekonomian berbasis teknologi (Badan Pusat Statistik, 2022). TIK memiliki potensi untuk mengubah cara masyarakat beraktivitas, seperti memberikan akses yang lebih cepat ke informasi yang relevan, menyediakan sarana komunikasi yang efisien, serta meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun indeks yang menggambarkan perkembangan TIK Indonesia dengan nama Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Di mana indeks tersebut memiliki nilai skala 0 – 10, semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK semakin baik di daerah tersebut.

Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi fondasi utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Melalui kemajuan pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara kerja, pembelajaran, dan interaksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memfasilitasi akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Pengembangan TIK juga mendorong sistem integrasi yang lebih optimal yang pada gilirannya akan mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan sampai pendidikan, serta sektor publik dan swasta (Oktavia, 2020).

Menurut UNESCO (2004) dalam (Saputra et al., 2021) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technologies* (ICT) merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, sebagai alat bantu untuk memanipulasi dan menyampaikan informasi, ataupun teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola dan mendistribusikan informasi.

2.1.5.1 Teori Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Teori Menurut Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dalam (Osipian, 2023) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi bersifat endogen, yaitu muncul dari keputusan para pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam penelitian, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Selain itu, teori ini menekankan bahwa akumulasi modal tidak terbatas pada modal fisik, melainkan mencakup modal manusia (*human capital*) yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas suatu negara. Modal manusia berkontribusi pada peningkatan produktivitas per unit input dan mendorong terjadinya *increasing return to scale*. Investasi pada pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja mampu menciptakan inovasi dan perubahan teknologi, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.5.2 Indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penghitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), BPS menggunakan 11 indikator untuk menyusun nilai IP-TIK yang

dibagi menjadi 3 sub indeks yaitu sub-indeks akses dan infrastruktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks keahlian.

1. Sub-indeks Akses dan Infrastruktur

Menggambarkan kesiapan teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT *Readiness*) yang diukur dari sisi akses dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan lima indikator penyusun sub-indeks.

2. Sub-indeks Penggunaan

Menggambarkan intensitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT *Intensity*) yang diukur dari penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tiga indikator penyusun sub-indeks.

3. Sub-indeks Keahlian

Menggambarkan kemampuan atau keahlian yang dibutuhkan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tiga indikator penyusun sub-indeks.

Tabel 2.1
Indikator dan Sub-indikator

Komponen	Penimbang Indikator	Penimbang Sub-indeks
Akses dan Infrastruktur		
a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk	0,20	0,40
b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk	0,20	
c. <i>Bandwidth</i> internet internasional per pengguna	0,20	
d. Presentase rumah tangga dengan komputer	0,20	
e. Presentase rumah tangga dengan akses internet		

Komponen	Penimbang Indikator	Penimbang Sub-indeks
Penggunaan		
a. Presentase individu yang menggunakan internet	0,33	0,40
b. Pelanggan <i>fixed broadband</i> internet per 100 penduduk	0,33	
c. Pelanggan <i>mobile broadband</i> internet aktif per 100 penduduk	0,33	
Keahlian		
a. Rata-rata lama sekolah	0,33	0,20
b. Angka partisipasi kasar sekunder	0,33	
c. Angka partisipasi tersier	0,33	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Langkah awal dari penghitungan nilai sub indeks yaitu dengan menghitung normalisasi indikator yang termasuk dalam setiap subindeks untuk mendapatkan unit pengukuran yang sama. Nilai sub indeks ini kemudian dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai tertimbang indikator yang termasuk dalam sub indeks masing-masing. Untuk perhitungan indeks akhir, sub indeks akses dan infrastruktur TIK serta sub indeks penggunaan TIK diberi bobot masing-masing 40 persen atau 0,4. Sedangkan sub indeks keahlian TIK diberi bobot 20 persen. Nilai indeks akhir kemudian dihitung dengan menjumlahkan sub indeks tertimbang.

Berdasarkan indikator dan penimbang di atas, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) diformulasikan sebagai berikut:

$$IP-TIK = 0,4 ACCESS + 0,4 USE + 0,2 SKILL$$

Keterangan:

ACCESS : Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK
 USE : Subindeks Penggunaan TIK
 SKILL : Subindeks Keahlian TIK

2.1.5.3 Konsep dan Definisi Penyusun IP-TIK

Konsep dan definisi dari indikator-indikator penyusun Indeks Pembangunan TIK menurut BPS sebagai berikut:

a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon tetap” mengacu pada jumlah saluran telepon tetap analog yang aktif, langganan *Voice-over-Internet Protocol* (VoIP), pelanggan lokal tetap nirkabel, *Integrated Services Digital Network* setara dengan saluran suara dan telepon umum. Selain itu, mencakup juga semua akses melalui infrastruktur tetap (*fixed*) yang mendukung telepon suara menggunakan kabel tembaga, layanan suara menggunakan Internet Protokol (IP) yang disampaikan melalui infrastruktur *fixed broadband* (misalnya digital *subscriber line*/DSL dan serat optik), serta layanan suara yang disediakan melalui jaringan televisi kabel coaxial (modem kabel).

b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon seluler” mengacu pada jumlah pelanggan kelayanan telepon seluler publik yang menyediakan akses ke jaringan telepon umum yang menggunakan teknologi seluler. Ini mencakup jumlah pelanggan pascabayar dan prabayar aktif selama tiga bulan sebelumnya. Tidak termasuk yang berlangganan melalui kartu data atau modem USB, berlangganan kelayanan data seluler publik, *radio seluler trunked* pribadi, *telepoint*, *paging radio*, M2M (*machine-to-machine*), dan layanan telemetri.

c. *Bandwidth* internet internasional (bit/s) per pengguna

Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/s (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu. *Bandwidth*

merupakan kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. *Bandwidth* internet internasional yang digunakan mengacu pada penggunaan rata-rata semua tautan internasional, yang digunakan oleh semua jenis operator.

d. Persentase rumah tangga dengan computer

Istilah “komputer” mengacu pada komputer desktop, laptop (portabel), tablet atau komputer genggam sejenis. Tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi tertanam, seperti perangkat televisi pintar, atau perangkat dengan fungsi utama telepon, seperti ponsel atau *smartphone*. Rumah tangga dengan komputer berarti bahwa komputer tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Komputer mungkin dimiliki atau mungkin tidak dimiliki oleh rumah tangga, tetapi harus dianggap sebagai aset rumah tangga.

e. Persentase rumah tangga dengan akses internet

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja.

f. Persentase individu yang menggunakan internet

Individu yang menggunakan internet mengacu pada individu berusia lima tahun ke atas yang menggunakan internet tanpa mempertimbangkan lokasi, tujuan, serta perangkat dan jaringan yang digunakan, dalam tiga bulan terakhir. Penggunaan dapat melalui komputer (misalnya komputer desktop,

laptop, tablet atau komputer genggam sejenis), ponsel, mesin *game*, televisi digital, dan lainnya. Akses dapat melalui jaringan tetap atau seluler.

g. Pelanggan *fixed broadband* internet per 100 penduduk

Pelanggan *fixed broadband* meliputi pelanggan modem kabel, DSL, fiber ke rumah/bangunan, langganan *bandwidth* (kabel) tetap lainnya, *broadband* satelit dan *broadband* nirkabel tetap terestrial.

h. Pelanggan *mobile broadband* internet aktif per 100 penduduk

Pelanggan *mobile broadband* internet aktif merupakan jumlah pelanggan yang pernah mengakses internet melalui *mobile broadband* dalam tiga bulan terakhir, termasuk langganan ke jaringan *broadband* seluler yang menyediakan kecepatan unduhan minimal 256 kbit/s (misalnya WCDMA, HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e dan LTE), dan tidak termasuk langganan yang hanya memiliki akses ke GPRS, EDGE dan CDMA 1xRTT.

i. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

j. Angka partisipasi kasar sekunder

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekunder adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut)

dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan yang sama (13-18 tahun).

k. Angka partisipasi kasar tersier

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tersier adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan D1 sampai dengan S1 (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama (19-23 tahun).

2.1.5.4 Skala Pengukuran Indeks Pembangunan TIK

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi (7,51–10), sedang (5,01–7,5), rendah (2,51–5), dan sangat rendah (0–2,5). Apabila nilai indeks di suatu wilayah mendekati 10, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan TIK di wilayah tersebut berkembang dengan baik dan cepat. Sebaliknya, jika nilai indeks mendekati 0, maka pembangunan TIK di wilayah tersebut dapat dianggap buruk atau lambat.

2.1.5.5 Tujuan Perhitungan Indeks Pembangunan TIK

Tujuan utama dari dihitungnya Indeks Pembangunan TIK yaitu sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah menggunakan suatu ukuran yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah.
2. Mengukur pertumbuhan pembangunan TIK di seluruh wilayah (indeks harus berlaku secara global).

3. Mengukur kesenjangan digital, yaitu perbedaan tingkat pembangunan TIK antarwilayah.
4. Mengukur potensi pembangunan TIK atau pengembangannya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan penulis. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(Athilla & Aida, 2025) “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Tahun 2018-2022”	Invesatsi, Tenaga Kerja, IP-TIK, dan PDRB	Objek penelitian 34 provinsi di Indonesia	investasi, tenaga kerja, dan IP-TIK berpengaruh positif terhadap PDRB di Indonesia.	<i>Economics and Digital Business Review</i> , 6(1), 626-635.
2.	Rawung et al., (2022) “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara”	PMA dan PMDN	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara.	PMA dan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22(2).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	(Aulia Sophie & Samsuddin M. Afdal, 2025) Pengaruh Realisasi PMA, PMDN dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali”	PMA, PMDN, TPAK, dan PDRB	Objek penelitian di Provinsi Bali.	PMA, PMDN, dan TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.	Pusat Publikasi Ilmu Manajemen, 3(3), 217-232.
4.	(Manihuruk et al., 2024) “Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB di Sumatera Utara”	PMA, PMDN, dan PDRB	Data yang digunakan yaitu <i>time series</i> .	PMA dan PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara.	Pusat Publikasi Ilmu Manajemen, 3(3), 217-232.
5.	(Liow et al., 2022) “pengaruh jumlah penduduk dan Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Utara”	Investasi dan PDRB	Jumlah penduduk, objek penelitian Provinsi Sulawesi Utara.	jumlah penduduk dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22(2).
6	(Fauzy & Aimon, 2020) “pengaruh Penanaman Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat”	PMDN, PMA, Tenaga Kerja, dan PDRB	Daya yang digunakan yaitu data runtut waktu (<i>time series</i>).	PMDN dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, vol 1(4), 29-26
7.	(Alifia & Andrianus, 2024) “Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	IP-TIK dan PDRB	Jumlah pengguna internet, jumlah pengguna telepon seluler, objek penelitian di Indonesia.	IP-TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian jangka pendek, namun dalam jangka panjang keberadaan telepon seluler belum mampu meningkatkan	Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 29 No. 2, Agustus 2024.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				perekonomian secara signifikan.	
8.	(Oktavia, 2020) “Analisis Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Serta Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”	IP-TIK	Pendidikan	IP-TIK dan pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	In Prosiding National Symposium & Conference Ahlimedia (Vol. 1, No. 1, pp. 139-146).
9.	(Syamsuddin et al., 2021) “pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”	TPAK dan PDRB	Pendidikan, Data yang digunakan yaitu data runtut waktu (<i>time series</i>).	TPAK dan Pendidikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.	Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK), 2(1), 29-49.
10.	(Suwitra et al., 2024) “Determinants Of Foreign Investment On Economic Growth In North Sumatra Province”	Investasi Asing dan Tenaga Kerja	Inflasi, Upah Minimum.	inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi variabel tenaga kerja dan investasi asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.	Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 7(3), 5489-5513.
11.	(Pratiwi & Saputro, 2024a) “The Influence of Foreign Investment and Domestic Investment on Economic Growth”	PMA dan PMDN	Objek penelitian di negara berkembang, Data yang digunakan yaitu data	investasi asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Bulletin of Fintech and Digital Economy, 5(1), 1-11.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			runtut waktu (<i>time series</i>).	investasi domestik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	
12.	(AI Akbar, 2022) “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Negeri dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Pada Periode Tahun 2017-2020”	PMA, PMDN, Angkatan Kerja, dan PDRB.	Objek penelitian di Provinsi Banten.	PMDN dan Angkatan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, namun PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.	POPULERE: Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol.1, No.4, Desember 2022.
13.	(Meilaniwati & Tannia, 2021) “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Negeri (Pmdn), Trade Openness (to) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean-5 Tahun 2009-2018”	PMA dan PMDN	<i>Trade Openness</i> , Inflasi, objek penelitian pertumbuhan ekonomi di ASEAN	PMA dan PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN, namun trade openness dan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan.	Jurnal Manajemen Bisnis, vol. 17, 1, 2021, hal.89-100.
14.	(Kafinas & Shofwan, 2025) “Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2017 – 2022”	IP-TIK dan TPAK	Pengguna Internet, Pengguna telepon seluler, PMTB, objek penelitian di Indonesia.	IP-TIK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pengguna internet memiliki pengaruh negatif dan signifikan penggunaan telepon seluler berpengaruh	QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 3(4), 1481-1490, November 2025.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				positif dan signifikan serta TPAK dan PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	
15.	(Maharani et al., 2025) “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019-2023”	PMDN, PMA, dan PDRB	Pengeluaran Per Kapita, objek penelitian di Provinsi NTB	PMDN dan Pengeluaran Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, namun PMA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB.	Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(1), 55-72, April 2025.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019) kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu utama.

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan kajian literatur yang relevan serta hasil penelitian terdahulu, sehingga mampu memberikan dasar yang dalam merumuskan hipotesis atau arah analisis dalam penelitian.

2.2.1 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi neo klasik yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Swan dalam (Sophie Aulia & M. Afdal

Samsuddin, 2025) dalam pandangannya, investasi asing dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi suatu negara dengan membawa modal, teknologi, dan keterampilan baru. PMA memungkinkan negara tuan rumah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih optimal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan output nasional. Dengan demikian, melalui mekanisme pasar yang bebas, PMA berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Solow dan Swan mengenai pentingnya perdagangan dan investasi dalam mendorong kemakmuran.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Arus masuk modal asing menyediakan tambahan sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, perluasan kapasitas produksi, serta penerapan teknologi baru yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, keberadaan PMA berpotensi menciptakan peluang kerja, yang pada gilirannya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan memperkuat daya beli. Dari sisi eksternal, PMA turut memperkuat posisi perekonomian nasional dalam pasar global melalui perluasan akses terhadap jaringan pasar internasional dan peningkatan daya saing produk domestik. Dengan demikian, PMA tidak hanya berperan sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama apabila didukung oleh kebijakan yang mendukung serta kerangka regulasi yang efektif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manihuruk et al. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa variabel penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan adanya investasi asing maka akan menciptakan iklim investasi baru yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, sehingga dengan adanya investasi asing ini negara dapat mengalami peningkatan produksi dan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencerminkan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha domestik pada berbagai sektor perekonomian. Keberadaan PMDN berperan dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya nasional. Peningkatan produktivitas tersebut selanjutnya berdampak pada bertambahnya output perekonomian secara agregat, yang pada akhirnya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Fadhilah et al., 2023). PMDN mengalirkan sumber daya ke sektor-sektor strategis yang dapat memperkuat basis ekonomi domestik, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta memperbaiki kualitas sumberdaya manusia. Selain itu, investasi modal dalam negeri juga membantu mengurangi ketergantungan pada modal luar dan memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Muryanto et al. (2022) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur”. Hasil penelitian mengatakan bahwa variabel investasi penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dengan besarnya investasi yang dimiliki maka akan menstimulus proses pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya menurut Irfan et al. (2023) berdasarkan penelitiannya hubungan antara penanaman modal dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Dengan adanya PMDN dapat memberikan fasilitas guna berjalannya proyek yang ada di dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian meningkatkan kemandirian daerah.

2.2.3 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan modal manusia yang esensial dalam proses produksi. Semakin tinggi TPAK, maka semakin besar pula ketersediaan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian. Kondisi ini akan meningkatkan volume produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dikutip dalam penelitian Ariesti & Asmara (2023) menurut Solow-Swan modal dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan output ekonomi. Peningkatan TPAK tidak hanya berdampak pada kuantitas tenaga kerja yang tersedia saja, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena lebih banyak individu yang terlibat dalam pelatihan

dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu determinan utama yang mempengaruhi skala output dalam aktivitas ekonomi. sehingga, semakin tinggi partisipasi tenaga kerja produktif di masyarakat, maka akan menghasilkan output yang lebih besar, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kafinas & Shofwan (2025) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk usia kerja berarti menunjukkan bertambahnya angkatan kerja, serta diimbangi dengan tingginya produktivitas kerja maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya menurut Suwitra et al. (2024) TPAK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika terdapat kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi.

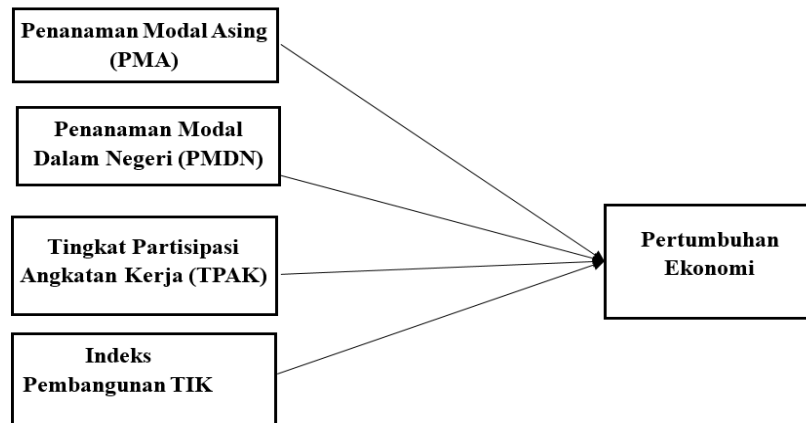
2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan hasil yang disebabkan oleh inovasi yang diciptakan oleh para pelaku usaha. Inovasi ini dipahami sebagai kemajuan teknologi secara luas. Teknologi mendorong kemajuan ekonomi dengan menghadirkan metode produksi yang baru dan meningkatkan akumulasi modal melalui efisiensi. Dengan kata lain, perkembangan teknologi yang lebih baik akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) mengukur ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur digital, akses terhadap teknologi, dan literasi digital masyarakat (Mousa, 2025). Pada era digital, TIK mempercepat arus informasi, efisiensi proses produksi, dan inovasi bisnis. Selain itu, IP-TIK juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses informasi dan pendidikan digital, yang selanjutnya memperkuat daya saing ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kemajuan dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya menjadi indikator modernisasi, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alifia & Andrianus (2024) menyatakan bahwa IP-TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan teknologi dan percepatan pembangunan TIK bisa memperkuat inklusifitas pertumbuhan di suatu wilayah dikarenakan kehadiran teknologi mempermudah suatu perusahaan/industri dalam memproduksi yang selanjutnya mendorong kinerja perekonomian melalui penambahan output. Sejalan dengan penelitian Berqilillah et al. (2024) menyatakan bahwa IP-TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh penyebaran teknologi yang hampir merata di seluruh Indonesia, yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah output produksi. Selain itu, keberadaan teknologi juga dapat mempermudah perekonomian.

Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian. Pertanyaan yang dirumuskan berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2020 - 2024.
2. Diduga secara bersama-sama penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2020 - 2024.